RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

SK TIM PENYUSUN RENSTRA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai 1
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode pos : 29124
Email : kesbangpol@kepriprov.go.id Website https://kesbangpol.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 483 /KPTS-32/ I /2025

TENTANG

TIM PENYUSUN SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2026.
2. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2026.
3. Merumuskan dan menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2026.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196907091992031011

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 483 / KPTS-32 / I / 2025
Tanggal : 10 Januari 2025

TIM PENYUSUN SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
3	Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
4	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Anggota
5	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
7	Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Bela Negara Dan Karakter Bangsa	Anggota
10	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
11	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	Anggota
12	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi	Anggota
13	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik	Anggota
14	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Sosial, Budaya, Dan Agama	Anggota
15	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

16	Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota
17	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
18	Des Yandri, S.IP	Staf Administrasi
19	Marianus Rawi	Staf Administrasi
20	Bahrurrohim, S.T	Staf Administrasi
21	Vivi Famela Anka, A.Md	Staf Administrasi

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. DARSON, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196907091992031011

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam kurun waktu 2025 hingga 2029.

Renstra ini disusun sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045, serta mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini juga memperhatikan prinsip-prinsip teknokratis, partisipatif, politis, serta berbasis pada data dan kebutuhan aktual di lapangan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik dari internal perangkat daerah maupun mitra strategis lainnya, yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Harapannya, Renstra ini dapat menjadi instrumen penguatan kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang “Maju, Makmur, dan Merata”.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang solid dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau ke depan.

Tanjungpinang, 19 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN RENSTRA ii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
I) BAB 1 ..... I-1
PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.3.1 Maksud I-5
1.3.2 Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-6
II) BAB 2 ..... II-1
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAREAH II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-1
2.1.2 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-8
2.1.2.1 Sumberdaya Manusia II-8
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana II-12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-16
2.2 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-17
2.3 Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-20
III) BAB 3 ..... III-1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau III-1

3.2 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau III-5

3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau III-6

IV) BAB 4 ..... IV-1

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... IV-1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV-47

V) BAB 5 ..... V-1

PENUTUP V-1

5.1 Kesimpulan V-1

5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1

5.3 Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Kepegawaian dan Penempatan Tahun 2025 ..... II-9
Tabel 2.2: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Kepegawaian II-9
Tabel 2.3: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan RIau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025 ..... II-10
Tabel 2.4: Daftar Jumlah Kebutuhan Sumberdaya Manusia Pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 ..... II-11
Tabel 2.5: Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ..... II-12
Tabel 2.6: Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Periode Rentra (Perubahan) Tahun 2021-2026 ..... II-14

Tabel 3.1: Kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepuluan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah III-2
Tabel 3.2: Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... III-3
Tabel 3.3: Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... III-4
Tabel 3.4: Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... III-5
Tabel 3. 5: Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ..... III-7

Tabel 4.1: Penjenjangan dan Penjabaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan IV-1
Tabel 4.2: Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan IV-16
Tabel 4.3: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-44
Tabel 4.4: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau IV-47
Tabel 4.5: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau IV-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau II-8

Gambar 3.1: Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau III-1

Gambar 4.1: Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD IV-1

KESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPULAUAN RIAU

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam mengelola urusan pemerintahan umum, termasuk bidang politik, ideologi, dan kewaspadaan nasional, sesuai dengan karakteristik wilayah dan dinamika lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin stabilitas dan ketahanan daerah sebagai fondasi pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Renstra ini menjadi acuan perencanaan kelembagaan yang selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029, serta mengacu pada RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan prinsip-prinsip perencanaan yang bersifat teknokratis, partisipatif, politis, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dalam konteks tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat integrasi nasional, serta mengantisipasi potensi konflik dan gangguan keamanan dalam negeri. Kesbangpol menjadi garda terdepan dalam penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, pengelolaan kehidupan berbangsa yang harmonis, serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan yang strategis memiliki tantangan khusus dalam menjaga kohesi sosial, kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme, serta dinamika sosial politik yang cepat berubah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis dan adaptif dalam

perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang mampu menjawab tantangan lokal sekaligus berkontribusi pada ketahanan nasional.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen teknis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang terukur. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman kerja kelembagaan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memperkuat kontribusi sektor kesbangpol terhadap prioritas pembangunan nasional seperti Asta Cita, Program Prioritas Nasional, dan agenda strategis lainnya.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan manajemen strategis dan kerangka logis (logic model), guna memastikan keterkaitan antara sumber daya, program, dan hasil yang diharapkan. Melalui dokumen ini, diharapkan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta menjadi institusi yang adaptif dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan keamanan di tingkat lokal, nasional, dan regional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, khususnya yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kehidupan politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, dan pembinaan ideologi Pancasila. Landasan hukum ini menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa perencanaan strategis yang disusun sejalan dengan kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045), arah kebijakan lima tahunan (RPJMD Tahun 2025–2029), serta prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, dasar hukum yang melandasi penyusunan Renstra ini disusun secara sistematis untuk menjamin keselarasan, legalitas, dan konsistensi perencanaan kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi I-5 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender Pada Pembangunan Nasional;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 70);

20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program kelembagaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dari visi, misi, dan agenda prioritas kepala daerah, serta menjadi turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Selain sebagai landasan perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, khususnya dalam bidang pembinaan ideologi, penguatan integrasi nasional, peningkatan kewaspadaan dini, serta fasilitasi kehidupan politik yang demokratis dan harmonis di daerah. Dengan demikian, dokumen ini disusun untuk mendorong pencapaian kinerja kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung ketahanan politik dan stabilitas daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini bertujuan untuk:

1) Memberikan arah strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama periode 2025–2029;
2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, terutama RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, serta RPJMN Tahun 2025–2029;

3) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja kelembagaan secara sistematis dan terukur;
4) Mendorong peningkatan kualitas tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik melalui perencanaan yang berbasis data, penguatan sistem deteksi dini, serta pengelolaan dinamika sosial-politik secara adaptif dan kolaboratif;
5) Mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, akuntabel dalam pelaksanaan tugas, dan berorientasi pada hasil (result-based management).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan sistematika yang mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan struktur yang sistematis, konsisten, dan terukur dalam menyusun arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan perangkat daerah. Adapun sistematika penulisan dokumen Renstra ini terdiri atas:

1) Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis, yang memuat deskripsi pelayanan utama Barenlitbang, capaian kinerja lima tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan aktual, serta isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi kelembagaan.
3) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, yang berisi rumusan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
4) Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memuat penjabaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

5) Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan substantif, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja perangkat daerah.

KESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPULAUAN RIAU

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAREAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk merupakan tipe A.

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat,Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa,Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
5) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

1) Sekretariat

   Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a) penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Program dan Anggaran, Keuangan,Umum dan Kepegawaian;
   b) pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
   c) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi program dan anggaran;
   d) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator program dan anggaran;
   e) penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan;
   f) pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

g) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
h) pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program Badan;
i) penyusunan program dan anggaran;
j) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kepala Badan;
k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;
l) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan Sub Koordinator keuangan;
m) pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
n) pelaksanaan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
o) pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan keuangan Badan;
p) penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
q) penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
r) penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
b) pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
c) pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Badan;

d) pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Badan;
e) pelaksanaan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Badan;
f) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
g) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Bangsa;
b) penyiapan bahan rencana kerja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
f) pelaksanaan koordinasi dan monitoring Kegiatan Pembinaan Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
g) penyiapan bahan rencana kerja Bela Negara dan Karakter Bangsa;
h) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Bela Negara dan Karakter Bangsa;
i) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;
j) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Bela Negara dan Karakter Bangsa;
k) pelaksanaan koordinasi dan monitoring kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan

l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
b) penyiapan bahan rencana kerja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
f) pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan politik bagi anggota partai politik;
g) penyiapan laporan Data Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi;
h) penyiapan bahan rencana kerja Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
i) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
j) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
k) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
l) pelaksanaan verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
m) pelaksanaan koordinasi, identifikasi, pembaharuan data, monitoring dan evaluasi partai politik;

n) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak PANWASLU dan KPU; dan
o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
b) penyiapan bahan rencana kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
f) penciptaan dan atau pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan produk dalam negeri;
g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat ketahanan ekonomi;
h) pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dalam menjaga kerukuan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
i) pelaksanaan pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat;
j) penyiapan bahan rencana kerja Organisasi Kemasyarakatan;
k) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
l) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Organisasi Kemasyarakatan;
m) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Organisasi Kemasyarakatan;

n) pemeriksaan monitoring dan evaluasi Organisasi Masyarakat/LSM yang menerima bantuan sosial dan pembaharuan database;
o) pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi manajemen organisasi masyarakat sesuai kebijakan/regulasi yang mengatur tentang organisasi masyarakat; dan
p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bangsa mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik;
   b) penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
   c) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
   d) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
   e) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
   f) pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
   g) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM);
   h) pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
   i) penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;
   j) penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
   k) penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Penanganan Konflik;
   l) penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Konflik;

m) pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim Terpadu dalam hal penanganan konflik;
n) penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik; dan
o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

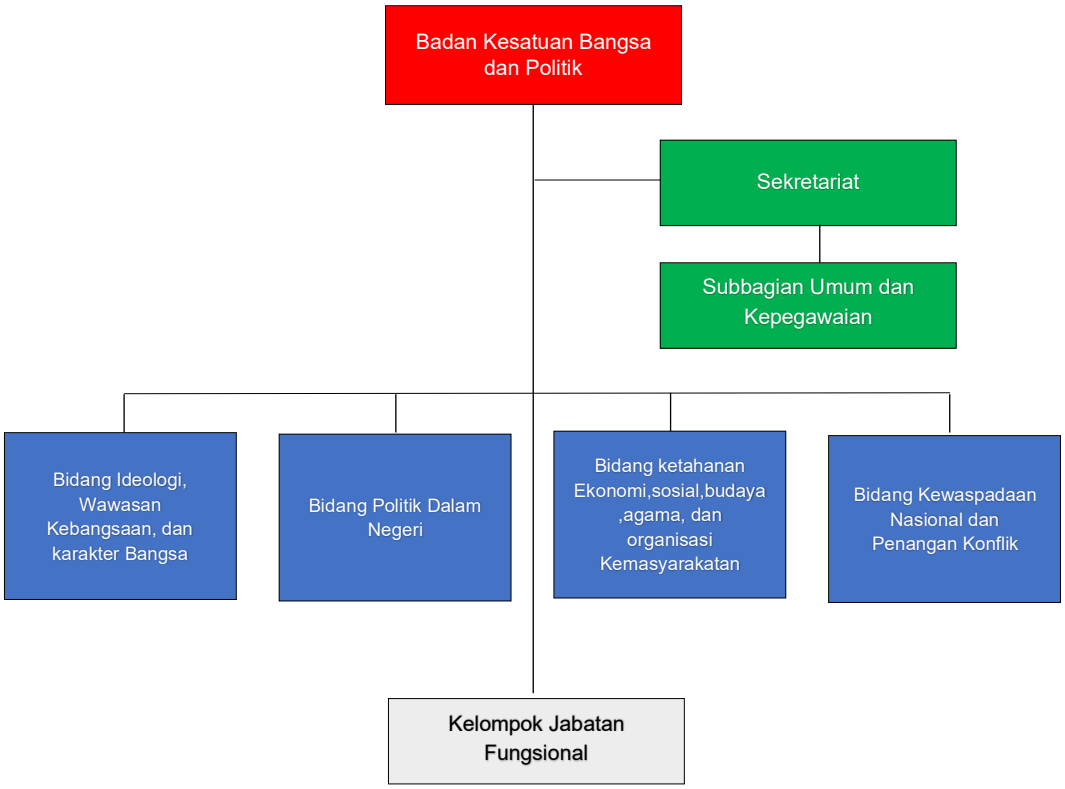

Gambar 2.1: Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2 Sumberdaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia sangat menentukan efektivitas kelembagaan dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam

menjaga stabilitas politik daerah, memperkuat integrasi nasional, meningkatkan kewaspadaan dini, serta membina kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di wilayah Kepulauan Riau. Untuk itu, pengelolaan SDM yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal selama periode perencanaan 2025–2029, pemetaan terhadap kondisi aktual SDM menjadi langkah awal yang penting. Pada bagian berikut disajikan data dan informasi terkait jumlah sumberdaya mansuia pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status kepegawaian, golongan, dan tingkat pendidikan formal Yang dapa dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur secara berkelanjutan.

Tabel 2.1: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Kepegawaian dan Penempatan Tahun 2025

NO	SEKRETARIAT/BIDANG	ASN						
		PNS			PPPK			JUMLAH
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	
1	Sekretariat	5	4	9	10	4	14	23
2	Bidang Politik Dalam Negeri	6	0	6	3	1	4	10
3	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	2	2	4	2	1	3	7
4	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	4	1	5	2	2	4	9
5	Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	5	2	7	1	1	2	9
JUMLAH				**31**			**27**	**58**

Tabel 2.2: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Kepegawaian

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV/d	1	0	1
2	IV/c	0	0	0
3	IV/b	2	0	2
4	IV/a	2	0	2
5	III/d	10	7	17
6	III/c	2	1	3
7	III/b	2	1	3
8	III/a	2	0	2
9	IX	10	5	15
10	VII	0	2	2
11	V	8	2	10
JUMLAH		**39**	**18**	**57**

Tabel 2.3: Jumlah Sumberdaya Manusia Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Rlau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor / S3	0	0	0
2	Magister / S2	8	0	8
3	Sarjana / S1/D4	22	14	36
4	DIPLOMA 3 / D3	1	2	3
5	SLTA	8	2	10
JUMLAH		**39**	**18**	**57**

Distribusi pegawai berdasarkan status kepegawaian dan penempatan menunjukkan bahwa dari total 58 orang ASN, sebanyak 31 orang berstatus PNS dan 27 orang berstatus PPPK. Sekretariat menjadi unit dengan jumlah pegawai terbesar, yakni 23 orang, sementara bidang-bidang teknis rata-rata memiliki 7 hingga 10 orang. Komposisi ini memperlihatkan bahwa beban administrasi dan koordinasi yang relatif lebih besar di Sekretariat memang memerlukan dukungan personel lebih banyak, sementara bidang teknis berfokus pada substansi kerja yang spesifik dengan formasi yang lebih ramping.

Jika ditinjau dari jenjang golongan kepegawaian, mayoritas pegawai berada pada golongan III, khususnya golongan III/d yang berjumlah 17 orang. Jumlah ini menunjukkan dominasi pegawai pada level pelaksana dan pengawas yang menjadi tulang punggung operasional kelembagaan. Namun demikian, pegawai pada golongan IV masih relatif terbatas, yakni hanya 5 orang, sehingga ruang regenerasi dan promosi untuk mengisi posisi strategis ke depan masih terbuka lebar. Kondisi ini menuntut perhatian dalam pembinaan karier agar kesinambungan kepemimpinan dan kompetensi manajerial dapat terjaga.

Dari sisi pendidikan formal, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 36 orang berpendidikan sarjana (S1/D4) dan 8 orang bergelar magister (S2). Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 10 orang dan D3 sebanyak 3 orang, yang menunjukkan perlunya program pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Sementara itu, belum adanya pegawai dengan pendidikan doktoral (S3) mengindikasikan bahwa peluang peningkatan kompetensi akademik ke jenjang tertinggi masih terbuka, khususnya untuk mendukung kebutuhan analisis kebijakan yang lebih mendalam di masa depan.

Secara keseluruhan, gambaran SDM Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kapasitas yang cukup memadai dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Jumlah personel relatif proporsional dengan kebutuhan bidang, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, serta komposisi usia karier berada pada level menengah yang produktif. Kendati demikian, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi berupa keterbatasan pegawai pada golongan tinggi, dominasi pendidikan sarjana tanpa keberlanjutan ke jenjang doktoral, serta perlunya penguatan kompetensi bagi pegawai dengan pendidikan menengah. Dengan demikian, strategi pembinaan karier, peningkatan kualifikasi pendidikan, serta program pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kesiapan organisasi menghadapi dinamika tugas di masa mendatang.

Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki sejumlah tantangan dalam hal ketersediaan pegawai pada jenjang karier dan kualifikasi pendidikan tertentu. Untuk itu, diperlukan proyeksi kebutuhan pegawai pada periode 2025–2030 sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika organisasi dan beban kerja yang terus berkembang. Proyeksi ini bukan hanya ditujukan untuk menambah jumlah personel semata, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan antara jumlah, kompetensi, dan penempatan pegawai agar setiap bidang memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Dengan perencanaan kebutuhan yang terarah, kelembagaan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kinerja sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis di masa mendatang.

Tabel 2.4: Daftar Jumlah Kebutuhan Sumberdaya Manusia Pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

NO	SEKRETARIAT/ BIDANG	STAF PNS SAAT INI (JUNI 2025)	STAF PPPK SAAT INI (JUNI 2025)	KEBUTUHAN SDM											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Sekretariat	4	14	0	0	0	1	4	0	2	1	2	0	0	0
2	Bidang Politik Dalam Negeri	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
3	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
4	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

NO	SEKRETARIAT/ BIDANG	STAF PNS SAAT INI (JUNI 2025)	STAF PPPK SAAT INI (JUNI 2025)	KEBUTUHAN SDM											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
5	Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
JUMLAH		**14**	**27**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**0**	**4**	**1**	**5**	**0**	**5**	**0**

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung yang tidak kalah penting dibandingkan dengan sumber daya manusia. Ketersediaan kendaraan dinas, perangkat teknologi informasi, serta peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi untuk memperlancar proses administrasi, koordinasi, maupun pelayanan teknis di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi sarana dan prasarana yang baik menjadi modal utama untuk menjaga kelancaran operasional dan mendukung pencapaian tujuan strategis kelembagaan selama periode Renstra 2025–2029.

Meskipun secara umum kondisi sarana dan prasarana masih tergolong baik dan layak pakai, kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengadaan secara berkala tetap menjadi perhatian agar daya dukung terhadap pelaksanaan tugas kelembagaan senantiasa optimal. Oleh karena itu, pemetaan terhadap aset yang ada penting dilakukan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di masa mendatang. Rincian mengenai jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5: Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi
I	**KENDARAAN :**			
1	Kendaraan Roda 4	Unit	3	Baik
2	Kendaraan Roda 2	Unit	3	Baik
II	**Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			
1	Mesin Faximile	Unit	1	Baik
2	Mesin Tik Elektik	Unit	1	Baik
3	Lemari Arsip	Unit	6	Baik
4	Printer	Unit	35	Baik

No	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi
5	Infocus	Unit	2	Baik
6	Laptop	Unit	44	Baik
7	Camera Digital	Unit	2	Baik
8	Tabung Pemadam CO2	Unit	3	Baik
9	Tabung Dry Powder	Unit	5	Baik
10	Computer PC	Unit	26	Baik
11	Televisi	Unit	5	Baik
12	Unit Power Supply	Unit	14	Baik
13	Lemari Besi Kaca	Unit	7	Baik
14	Filling Cabinet	Unit	7	Baik
15	Kursi Rapat	Unit	24	Baik
16	Kursi Kerja	Unit	47	Baik
17	Meja Kerja	Unit	47	Baik
18	Meja 1 Biro	Unit	6	Baik
19	Meja ½ Biro	Unit	2	Baik
20	Sofa	set	1	Baik
21	Partisi	Unit	3	Baik
22	Handy Cam	Unit	4	Baik
23	Meja Tamu	Set	1	Baik
24	Meja Kerja Pimpinan	Set	1	Baik
25	Interior Ruangan Kantor	Set	1	Baik
26	Webcam	Unit	1	Baik
27	Pointer	Unit	1	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau selama periode perencanaan sebelumnya mencerminkan sejauh mana implementasi program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator yang terkait langsung dengan harmonisasi kehidupan masyarakat, ketahanan nasional, peningkatan wawasan kebangsaan, penegakan demokrasi, serta tata kelola kelembagaan. Hasil pengukuran ini tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian terhadap target tahunan dan target akhir periode, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan yang perlu menjadi perhatian pada periode Renstra (perubahan) 2021–2026. Dengan demikian, kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjadi dasar penting bagi penyusunan strategi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di masa mendatang.

Tabel 2.6: Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Periode Rentra (Perubahan) Tahun 2021-2026

No	Tujuan, Sasaran, dan Program	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target			Target Akhir Periode (2026)	Capaian 2024	% Kinerja Terhadap Target 2024	% Kinerja Terhadap Target Akhir 2026
						2024	2025	2026				
1	Tujuan 1 Mewujudkan Harmoni Masyarakat dan Stabilitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	85,78	75.95	81.62	82.93	84.26	84.26	82,21	100,72	97,57
		Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	2,95	2.83	2.85	2.87	2.89	2.89	3,04	106,67	105,19
2	Sasaran 1.1: Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Persentase konflik (Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Suku, Etnis, Agama, Hukum dan HAM) yang tertangani	%	n/a	60	60,01	60,02	60,03	60,03	100	166,64	166,58
3	Program Penguatan Ideologl Pancaslla Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	n/a	0	0	0	0	0	0	100	100,00
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	n/a	0	0	0	0	0	0	100	100,00
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21	85	88	90	93	93	97	110,23	104,30
7	Sasaran 1.2: Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat dan Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	78,77	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80	77,66	98,58	98,55
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	%	0	0	70	0	0	0	66,335	94,76	-
		Indeks Demokrasi Indonesia	%	78,77	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80	77,66	98,58	98,55
9	Tujuan 2 Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,75	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77	75,30	106,42	106,40
10	Sasaran 2.1 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	70,75	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77	75,30	106,42	106,40
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar indikator Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Tujuan 1: Mewujudkan Harmoni Masyarakat dan Stabilitas Daerah, Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2024 mencapai nilai 82,21, sedikit lebih tinggi dari target tahun berjalan (81,62) dengan capaian 100,72%, meskipun masih berada di bawah target akhir periode 2026 (84,26). Hal ini menunjukkan tren positif namun masih diperlukan upaya peningkatan untuk menjaga konsistensi harmonisasi antarumat beragama. Sementara itu, Indeks Ketahanan Nasional justru menunjukkan capaian yang signifikan, yaitu 3,04 pada tahun 2024 atau 106,67% terhadap target tahun berjalan dan 105,19% terhadap target akhir 2026. Capaian ini menandakan adanya penguatan ketahanan nasional di daerah, meskipun perlu dipastikan keberlanjutannya di tahun-tahun berikutnya.

Pada Sasaran 1.1 mengenai harmonisasi antar umat beragama, indikator persentase konflik yang tertangani menunjukkan capaian yang jauh melampaui target, yaitu 100% pada tahun 2024, dibandingkan target hanya 60,01%. Kondisi ini menandakan respons dan penanganan konflik sudah berjalan optimal, meskipun tetap penting menjaga sistem deteksi dini dan fasilitasi resolusi konflik agar capaian tetap berkelanjutan. Demikian pula pada indikator konflik antar suku, etnis, maupun antar agama, capaian 100% konsisten sesuai target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa potensi konflik dapat dicegah atau ditangani dengan baik.

Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang sesuai aturan meningkat hingga 97% pada tahun 2024, melampaui target tahunan (88%) maupun target akhir periode (93%). Hal ini menggambarkan meningkatnya kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap regulasi yang berlaku. Pada Sasaran 1.2 terkait pemahaman politik masyarakat, capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 berada di angka 77,66, sedikit di bawah target (78,78) dengan persentase capaian 98,58%. Capaian ini menunjukkan stabilitas, meskipun perbaikan kualitas demokrasi tetap menjadi agenda strategis ke depan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu juga mencapai 66,33%, relatif mendekati target 70%, sehingga memerlukan strategi penguatan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, pada Tujuan 2 mengenai peningkatan kinerja organisasi, nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pada tahun 2024 nilai yang dicapai adalah 75,30, melampaui target tahunan (70,76) dan target akhir periode (70,77) dengan capaian di atas 106%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol sudah berada pada jalur yang sangat positif. Sementara itu, indikator tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor tetap konsisten pada angka 100%, menunjukkan pelayanan administrasi yang stabil, responsif, dan berjalan tanpa hambatan berarti.

Secara umum, evaluasi kinerja periode sebelumnya menunjukkan capaian yang memuaskan, baik dari sisi harmonisasi sosial, penguatan ketahanan nasional, penanganan konflik, kepatuhan organisasi kemasyarakatan, maupun peningkatan tata kelola kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, serta penguatan kerukunan antarumat beragama untuk mencapai target akhir periode.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau memiliki kelompok sasaran layanan yang beragam sesuai dengan karakteristik tugas pokoknya. Kelompok sasaran ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat maupun terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan, program, dan kegiatan Kesbangpol, baik pada tingkat pemerintah, organisasi, maupun masyarakat.

Adapun kelompok sasaran layanan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat utama dalam upaya peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta peningkatan kesadaran bela negara.
2) Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Sosial Politik, sebagai mitra strategis dalam penguatan partisipasi masyarakat, demokratisasi, dan pengembangan kehidupan politik yang sehat dan bertanggung jawab.

3) Partai politik, yang menjadi sasaran pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, kaderisasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan demokrasi di daerah.
4) Generasi muda, pelajar, dan mahasiswa, sebagai kelompok strategis dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, penguatan karakter, serta pencegahan radikalisme dan intoleransi.
5) Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, yang berperan penting dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural.
6) Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai mitra koordinasi dalam pelaksanaan program kesatuan bangsa dan politik serta fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan masyarakat.
7) Aparat pemerintah dan aparatur sipil negara, dalam rangka peningkatan kapasitas, sinergi, dan integritas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, kewaspadaan nasional, dan persatuan bangsa.
8) Kelompok rentan, seperti masyarakat di wilayah perbatasan, pulau terluar, maupun komunitas minoritas, yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka penguatan ketahanan sosial, perlindungan hak politik, dan pemenuhan rasa aman.

Dengan penetapan kelompok sasaran layanan tersebut, arah pembangunan dan strategi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di daerah perbatasan serta wilayah multikultural seperti Kepulauan Riau.

2.2 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas politik, ketahanan nasional, serta pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi fungsi pelayanan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas

di lapangan, mencakup aspek manajerial, operasional, maupun teknis pelayanan. Oleh karena itu, identifikasi secara mendalam terhadap permasalahan pelayanan menjadi langkah krusial dalam penyusunan rencana strategis sebagai dasar perumusan kebijakan dan program yang lebih responsif, efektif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pengungkapan permasalahan ini disusun secara tematik berdasarkan fungsi-fungsi utama Kesbangpol, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang politik, ideologi, dan ketahanan nasional di tingkat daerah. Berikut ini disajikan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
   - Cakupan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi masyarakat terkait penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara masih terbatas, belum menjangkau seluruh kelompok strategis, termasuk generasi muda dan kelompok rentan.
   - Program pembinaan Paskibraka belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen strategis pembentukan karakter kebangsaan dan internalisasi nilai-nilai ideologi negara secara sistematis.
   - Belum terbangunnya kolaborasi antarsektor dan pola pembinaan ideologi kebangsaan yang terpadu dan berkelanjutan antara instansi pemerintah, organisasi pemuda, dan ormas dalam memperkuat ketahanan ideologi di tingkat lokal.
2) Bidang Politik Dalam Negeri;
   - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada level yang relatif rendah. Dari tiga aspek yang diukur dalam IDI, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, aspek kapasitas lembaga demokrasi merupakan yang terendah. Rendahnya skor aspek ini terutama disebabkan oleh belum optimalnya kinerja lembaga legislatif serta peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang inklusif bagi kader maupun masyarakat.

- Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik masih terfokus pada internal kader, belum menyasar kelompok masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri, termasuk kepada organisasi perempuan dan pemilih pemula.
- Dukungan terhadap peningkatan kualitas demokrasi daerah melalui bantuan keuangan partai politik (banpol) belum diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas dan dampak pendidikan politik yang terukur di masyarakat.

3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
   - Persentase organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum maksimal, ditandai dengan banyaknya ormas yang tidak aktif atau belum terdaftar resmi dalam sistem administrasi pemerintah. Hingga bulan agustus 2025 jumlah ormas dan yayasan yang terdaftar di Badan Kesbangpol Privinsi Kepulauan Riau berikisa 280 ormas dan yayasan.
   - Belum optimalnya pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam mendorong peran serta masyarakat sipil secara konstruktif, transparan, dan sesuai nilai-nilai kebangsaan.
   - Masih terdapat potensi konflik ekonomi, budaya, dan agama yang belum tertangani secara menyeluruh, disebabkan lemahnya integrasi data,

rendahnya literasi keberagaman, dan belum adanya forum komunikasi lintas komunitas yang berjalan efektif.

4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
   - Masih terdapat potensi konflik personal atau antarindividu yang berisiko berkembang menjadi konflik sosial berbasis suku atau etnis, akibat belum optimalnya sistem deteksi dini dan mekanisme penyelesaian berbasis komunitas.
   - Penanganan potensi konflik sosial di daerah masih bersifat reaktif, belum ditopang oleh sistem kewaspadaan nasional yang berbasis data, teknologi informasi, dan pelibatan aktor lokal secara partisipatif.
   - Koordinasi antar-instansi dalam penanganan konflik masih belum sinergis, serta belum adanya SOP terpadu dalam mekanisme respons cepat terhadap indikasi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

5) Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola Internal;
   - Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan untuk mencerminkan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan berbasis hasil, khususnya dalam hal integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program strategis.
   - Profesionalisme sumber daya manusia masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal penguasaan substansi bidang kesatuan bangsa, penggunaan teknologi informasi, serta kemampuan komunikasi lintas budaya dan aktor sosial-politik.
   - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan layanan, peningkatan akses informasi, dan pendekatan pelayanan yang lebih partisipatif.

2.3 Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai permasalahan pokok yang memiliki dampak luas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta menuntut perhatian dan penanganan yang serius dalam periode perencanaan jangka menengah. Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, pencapaian indikator kinerja utama, serta

memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan dinamika aktual kewilayahan.

Sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik. Posisi strategis wilayah, keberagaman masyarakat, dinamika politik lokal, serta potensi gangguan terhadap stabilitas sosial menjadikan peran Badan Kesbangpol sangat penting dalam menjaga ketahanan ideologi, memperkuat demokrasi, serta membangun tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Rumusan isu strategis daerah berikut ini juga selaras dengan isu strategis nasional yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah, khususnya dalam pilar pembangunan ideologi, demokrasi, hukum, dan kerukunan sosial. Adapun isu-isu strategis Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1) Penguatan peran kelembagaan politik dan demokrasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas Indeks Demokrasi Provinsi;

   Upaya mendorong peningkatan Indeks Demokrasi Provinsi Kepri memerlukan penguatan peran partai politik dan lembaga pemerintahan dalam memberikan pendidikan politik yang inklusif kepada masyarakat. Langkah strategis yang diperlukan mencakup fasilitasi pendidikan politik secara lebih luas kepada kelompok sasaran seperti pemilih pemula, organisasi perempuan, dan masyarakat umum, serta peningkatan kualitas kelembagaan partai politik dalam mendorong tata kelola demokrasi yang partisipatif. Isu ini selaras dengan Isu Strategis Nasional, yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan ketahanan ideologi dan kehidupan berbangsa, melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan peningkatan literasi politik masyarakat.

2) Penguatan ketahanan sosial dan ideologi kebangsaan melalui peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan potensi konflik sosial berbasis komunitas;

   Dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang multikultural, diperlukan upaya pembinaan wawasan kebangsaan yang lebih terstruktur, menyasar kelompok pemuda, ormas, serta masyarakat akar rumput. Selain itu, mekanisme deteksi dini, forum dialog komunitas, dan sistem peringatan dini perlu diperkuat guna mencegah konflik berbasis identitas dan sosial-budaya. Isu ini mendukung Isu

Strategis Nasional yaitu; “penguatan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama melalui penyelarasan kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran”.

KESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPULAUAN RIAU

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI , DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Rumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis melalui keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan sebagai penjabaran langsung dari visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan *outcome* program yang telah ditetapkan. Perumusan ini juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam kewenangan urusan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan kelembagaan dapat tersusun secara terintegrasi dan terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun prioritas nasional secara sinergis dan akuntabel.

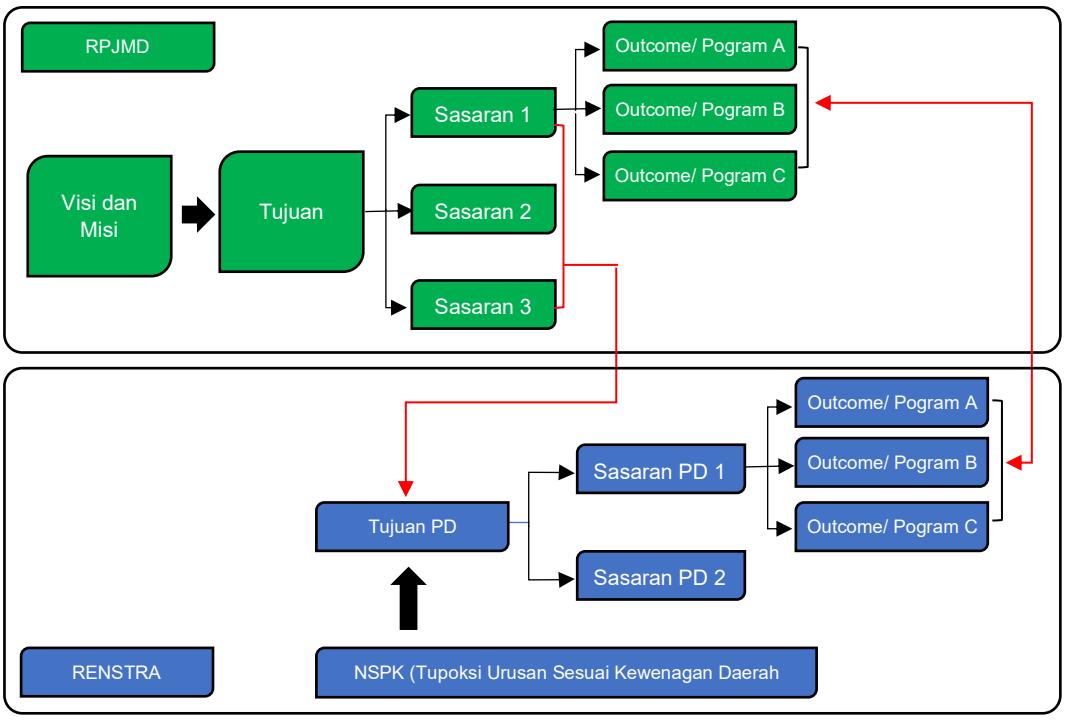

Gambar 3.1: Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana tergambar dalam alur keterkaitan RPJMD dan Renstra perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepuluan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasran RPJMD	Rumusan	Indikator
Visi RPJMD	"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"	-
Misi Ke 4	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan.	-
Tujuan Ke 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran ke 3	Meningkatnya perkembangan demokrasi pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi
Misi Ke 5	Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional serta ekologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.	-
Tujuan Ke 1	Meningkatkan kehidupan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Harmoni
Sasaran Ke 1	Meningkatnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Melayu	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan mekanisme perencanaan yang menggambarkan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra perangkat daerah, serta mengacu pada kontribusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2: Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran	Rumusan Tujuan / Sasaran	Indikator
Tujuan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi
Sasaran 1	Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Sasaran 2	Terselesaikanya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan

Dari rumusan tujuan dan sasaran renstra beserta indikatornya tersebut selanjutnya ditetapkan target capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.3: Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Indeks	77,67	77,68	77,69	77,70	77,71	77,72	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi	Indeks	84.32-84.46	84.37-84.51	84.42-84.56	84.47-84.61	84.52-84.66	84.52-84.66	
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	74,25	74,26	74,27	74,28	74,29	74,3	
	Terselesaikanya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Strategi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai kerangka arah operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini dirumuskan secara bertahap dan sistematis, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, permasalahan aktual, capaian indikator kinerja, serta memperkuat kontribusi Kesbangpol terhadap pembangunan politik, ideologi, dan ketahanan nasional di tingkat daerah. Penetapan strategi dilakukan melalui pendekatan penahapan tahunan, yang dimulai dari penguatan fondasi kelembagaan dan penataan program prioritas, peningkatan kapasitas dan implementasi program strategis, hingga pada tahap evaluasi capaian dan penyusunan arah kebijakan lanjutan. Setiap tahapan dirancang untuk saling memperkuat, membentuk kesinambungan, serta menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga strategi yang diambil mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 3.4: Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tahun	Penahapan	Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra
2026	Akselerasi pembinaan lembaga demokrasi dan organisasi masyarakat, serta fasilitasi kerukunan antar umat beragama untuk memperkuat iklim demokrasi yang kondusif.	Mendukung Sasaran 1 melalui percepatan peningkatan kapasitas lembaga demokrasi dan pembinaan politik masyarakat, serta kontribusi awal pada Sasaran 2 melalui fasilitasi penyelesaian potensi konflik.
2027	Pengembangan model kelembagaan dan jejaring sosial-politik dalam mendorong demokrasi yang sehat serta toleransi kehidupan beragama.	Memperkuat Sasaran 1 dengan pengembangan instrumen demokrasi partisipatif dan peran forum keagamaan, sekaligus memperluas dukungan pada Sasaran 2 melalui jejaring pencegahan konflik berbasis komunitas.
2028	Penguatan sistem deteksi dini dan kapasitas kelembagaan dalam mencegah serta menangani potensi konflik secara komprehensif.	Berfokus pada Sasaran 2 melalui penguatan sistem deteksi dini dan konsolidasi kelembagaan, serta memperkokoh Sasaran 1 dengan data dan informasi politik, ormas, dan kerukunan umat beragama yang lebih baik.

Tahun	Penahapan	Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra
2029	Pemantapan tata kelola pembinaan politik dan kehidupan beragama yang inklusif, demokratis, dan toleran.	Mengkonsolidasikan capaian Sasaran 1 dan 2 melalui tata kelola demokrasi yang transparan, resolusi konflik yang berkelanjutan, dan peran Kesbangpol sebagai fasilitator utama kerukunan dan demokrasi daerah.
2030	Perwujudan kehidupan masyarakat beragama yang rukun, toleran, dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 di Provinsi Kepulauan Riau.	Mewujudkan Tujuan Renstra: tercapainya kehidupan masyarakat beragama yang rukun, toleran, demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman operasional dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Toleran, Demokratis, Berlandaskan Pancasila dan UUD'45 di Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan arah kebijakan ini mempertimbangkan tiga pilar utama, yaitu: operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dari pemerintah pusat; konsistensi terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai dokumen induk pembangunan daerah; serta kesinambungan dengan strategi internal perangkat daerah yang telah dirumuskan dalam Renstra. Dengan pendekatan tersebut, arah kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dalam deteksi dan pencegahan ancaman seperti peredaran narkotika dan radikalisme berbasis teknologi informasi, penguatan stabilitas politik pasca pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, penataan ormas dan partai politik, serta pengembangan kemampuan intelijen sosial-politik lokal. Selain itu, kolaborasi multipihak juga menjadi prioritas dalam menjaga kerukunan antar suku dan etnis di tengah keberagaman masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 5: Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Peningkatan pembinaan dan pengawasan partai politik sesuai amanat UU Partai Politik	Peningkatan pembinaan kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif	▪ Penataan dan pembinaan organisasi masyarakat dan partai politik ▪ Peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Selaras dengan fungsi Kesbangpol sebagai fasilitator dan pembina kehidupan politik daerah
2	Penguatan pendidikan politik dan literasi demokrasi berbasis masyarakat	Peningkatan pembinaan kepada organisasi politik dan organisasi masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif	▪ Penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ▪ Peningkatan keterlibatan pemuda dan perempuan dalam politik	Mendukung demokrasi yang inklusif dan berkeadaban
3	Fasilitasi forum kerukunan umat beragama sesuai pedoman FKUB dan UU Ormas	Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	▪ Memperkuat harmoni sosial dan stabilitas politik pasca-pemilu ▪ Kolaborasi multipihak dalam menjaga kerukunan antar suku, etnis, dan agama	Mengedepankan dialog dan mediasi sosial berbasis kearifan lokal
4	Penguatan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial berbasis intelijen daerah	Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	▪ Peningkatan kemampuan intelijen sosial-politik lokal ▪ Pencegahan potensi radikalisme berbasis teknologi informasi	Mendukung stabilitas daerah melalui sistem peringatan dini konflik
5	Pelaksanaan strategi P4GN sesuai Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional	Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	▪ Penguatan deteksi dan pencegahan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) ▪ Kolaborasi multipihak dalam penanganan penyalahgunaan narkoba	Mencegah degradasi sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat

BAB 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAAN BIDANG URUSAN

BAB 4
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan hasil *cascading* dari tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah dirumuskan, dan selanjutnya diturunkan secara sistematis ke dalam outcome serta output yang ingin dicapai. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada mekanisme perencanaan yang mengintegrasikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan sasaran RPJMD, sehingga menjamin keterpaduan, keselarasan, dan akuntabilitas pencapaian kinerja pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan juga disusun berdasarkan nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pembaruan atau pemutakhirannya. Selain itu, daftar program yang disusun dalam periode Renstra ini tidak hanya mencakup pelaksanaan hingga tahun 2029, tetapi juga secara eksplisit mencantumkan program tahun 2030 sebagai pijakan awal dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030.

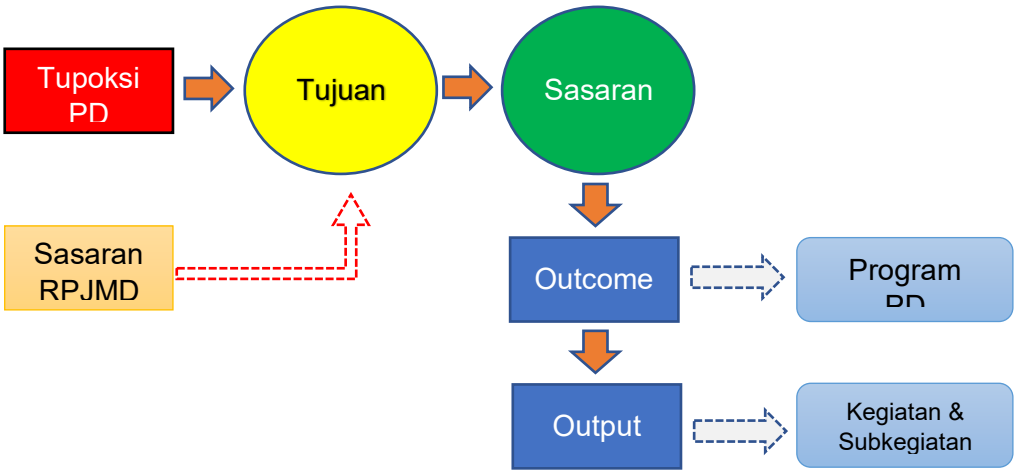

Gambar 4.1: Mekanisme Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Tabel 4.1: Penjenjangan dan Penjabaran Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Beragama yang Rukun, Demokratis Berlandaskan Pancasila dan UUD 45 di Provinsi Kepulauan Riau				Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)		
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Demokrasi Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau			Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	8.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi kepegawaian kantor secara lengkap dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran secara lengkap dan sesuai standar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang kantor penunjang urusan perkantoran secara memadai dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan kantor secara optimal dan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang-barang kantor secara teratur sesuai ketentuan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik		Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Terselesaikanya Potensi Konflik di Provinsi Kepulauan Riau			Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan (%)		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila		Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
			dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa		Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Terlaksananya penanganan konflik sosial serta pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bagi masyarakat, pemuda, dan Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka	
			Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Meningkatnya kepatuhan Ormas/LSM terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat		Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya penanganan konflik ekonomi, budaya, dan agama sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial		Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Terlaksananya penanganan potensi konflik sosial sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

Tabel 4.2: Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					54.135.815.448,33		50.125.777.184,00		80.125.777.185,00		223.125.777.184,00		55.125.777.184,00			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.989.857.226,78		18.092.752.546,00		19.226.276.906,00		20.182.354.735,00		20.002.602.152,00			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	11.989.857.226,78	BB	18.092.752.546,00	BB	19.226.276.906,00	BB	20.182.354.735,00	BB	20.002.602.152,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	83,88	83,97	84,85		85,73		87,53		88,75		89,64				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,54	88,55	88,56		88,57		88,58		88,59		88,60				
8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					502.382.015,00		582.198.487,00		629.444.732,00		677.255.627,00		554.910.789,00			
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	7	7	502.382.015,00	7	582.198.487,00	7	629.444.732,00	7	677.255.627,00	7	554.910.789,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	22	22		18		18		18		18				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	4		4		4		4		4				
8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					267.991.663,00		294.790.829,00		324.269.912,00		356.696.903,00		285.357.523,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20	22	22	267.991.663,00	18	294.790.829,00	18	324.269.912,00	18	356.696.903,00	18	285.357.523,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					123.995.831,00		136.395.415,00		150.034.956,00		165.038.452,00		132.030.761,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	4	123.995.831,00	4	136.395.415,00	4	150.034.956,00	4	165.038.452,00	4	132.030.761,00			
8.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					110.394.521,00		151.012.243,00		155.139.864,00		155.520.272,00		137.522.505,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	7	7	110.394.521,00	7	151.012.243,00	7	155.139.864,00	7	155.520.272,00	7	137.522.505,00			
8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.173.853.344,55		12.304.395.454,00		12.957.523.788,00		13.643.126.971,00		14.347.357.522,00			
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	10.173.853.344,55	1	12.304.395.454,00	1	12.957.523.788,00	1	13.643.126.971,00	1	14.347.357.522,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	32	61	61		61		61		61		61				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.592.408.662,00		11.304.804.947,00		11.870.045.194,00		12.463.547.454,00		13.086.724.827,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	32	61	61	9.592.408.662,00	61	11.304.804.947,00	61	11.870.045.194,00	61	12.463.547.454,00	61	13.086.724.827,00			
8.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					543.742.000,00		833.477.040,00		916.824.744,00		1.008.507.218,00		1.109.357.940,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	543.742.000,00	1	833.477.040,00	1	916.824.744,00	1	1.008.507.218,00	1	1.109.357.940,00			
8.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					26.525.998,10		116.870.344,00		120.064.764,00		120.359.167,00		106.430.460,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	26.525.998,10	1	116.870.344,00	1	120.064.764,00	1	120.359.167,00	1	106.430.460,00			
8.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					11.176.684,45		49.243.123,00		50.589.086,00		50.713.132,00		44.844.295,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	12	11.176.684,45	12	49.243.123,00	12	50.589.086,00	12	50.713.132,00	12	44.844.295,00			
8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.255.615,33		149.221.584,00		117.065.653,00		115.066.611,00		122.374.091,00			
Tersedianya administrasi kepegawaian kantor secara lengkap dan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	61	61	37.255.615,33	61	149.221.584,00	61	117.065.653,00	61	115.066.611,00	61	122.374.091,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	0	12		61		61		61		61				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					29.997.618,13		59.688.634,00		25.085.497,00		22.860.916,00		40.839.009,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	61	61	29.997.618,13	61	59.688.634,00	61	25.085.497,00	61	22.860.916,00	61	40.839.009,00			
8.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					7.257.997,20		89.532.950,00		91.980.156,00		92.205.695,00		81.535.082,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	0	12	7.257.997,20	61	89.532.950,00	61	91.980.156,00	61	92.205.695,00	61	81.535.082,00			
8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					556.603.515,05		2.166.511.783,00		2.294.437.114,00		2.407.752.124,00		2.114.505.764,00			
Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran secara lengkap dan sesuai standar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	556.603.515,05	1	2.166.511.783,00	1	2.294.437.114,00	0	2.407.752.124,00	1	2.114.505.764,00			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		13		27		20		20		29				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					141.571.338,26		623.746.220,00		640.795.090,00		642.366.340,00		568.027.736,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		13	141.571.338,26	27	623.746.220,00	20	640.795.090,00	20	642.366.340,00	29	568.027.736,00			
8.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					14.902.246,13		59.688.634,00		55.745.549,00		50.802.036,00		40.839.009,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	1	14.902.246,13	1	59.688.634,00	1	55.745.549,00	1	50.802.036,00	1	40.839.009,00			
8.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.941.347,74		38.797.612,00		39.021.885,00		38.101.527,00		32.671.207,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.941.347,74	1	38.797.612,00	1	39.021.885,00	1	38.101.527,00	1	32.671.207,00			
8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					22.353.369,20		92.517.382,00		89.192.879,00		83.823.359,00		69.426.316,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	22.353.369,20	1	92.517.382,00	1	89.192.879,00	1	83.823.359,00	1	69.426.316,00			
8.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					14.902.246,13		65.657.497,00		66.894.659,00		66.042.646,00		57.174.613,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	14.902.246,13	1	65.657.497,00	1	66.894.659,00	1	66.042.646,00	1	57.174.613,00			
8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					316.677.352,26		1.121.960.696,00		1.234.156.766,00		1.357.572.442,00		1.196.885.899,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	316.677.352,26	1	1.121.960.696,00	1	1.234.156.766,00	1	1.357.572.442,00	1	1.196.885.899,00			
8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					7.451.123,07		32.828.748,00		33.726.057,00		33.808.755,00		29.896.197,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.451.123,07	1	32.828.748,00	1	33.726.057,00	0	33.808.755,00	1	29.896.197,00			
8.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					29.804.492,26		131.314.994,00		134.904.229,00		135.235.019,00		119.584.787,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	29.804.492,26	1	131.314.994,00	1	134.904.229,00	1	135.235.019,00	1	119.584.787,00			
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					313.987.373,27		1.149.006.195,00		1.180.412.007,00		1.183.306.416,00		846.366.883,00			
Tersedianya barang kantor penunjang urusan perkantoran secara memadai dan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	3	313.987.373,27	2	1.149.006.195,00	2	1.180.412.007,00	2	1.183.306.416,00	2	846.366.883,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	5		5		5		5		5				
8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					135.160.419,69		361.116.233,00		370.986.631,00		371.896.302,00		128.858.163,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	3	135.160.419,69	2	361.116.233,00	2	370.986.631,00	2	371.896.302,00	2	128.858.163,00			
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					111.766.845,99		492.431.226,00		505.890.860,00		507.131.321,00		448.442.950,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	5	111.766.845,99	5	492.431.226,00	5	505.890.860,00	5	507.131.321,00	5	448.442.950,00			
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					67.060.107,59		295.458.736,00		303.534.516,00		304.278.793,00		269.065.770,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	2	67.060.107,59	2	295.458.736,00	2	303.534.516,00	2	304.278.793,00	2	269.065.770,00			
8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					287.988.346,30		1.268.841.878,00		1.303.523.162,00		1.306.719.442,00		1.155.497.790,00			
Tersedianya jasa penunjang urusan kantor secara optimal dan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	1	287.988.346,30	1	1.268.841.878,00	1	1.303.523.162,00	1	1.306.719.442,00	1	1.155.497.790,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	2		2		2		2		2				
8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					223.533.691,67		984.862.453,00		1.011.781.721,00		1.014.262.642,00		896.885.899,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	1	1	223.533.691,67	1	984.862.453,00	1	1.011.781.721,00	1	1.014.262.642,00	1	896.885.899,00			
8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.736.772,05		69.334.317,00		71.229.433,00		71.404.090,00		63.140.767,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	2	2	15.736.772,05	2	69.334.317,00	2	71.229.433,00	2	71.404.090,00	2	63.140.767,00			
8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					48.717.882,58		214.645.108,00		220.512.008,00		221.052.710,00		195.471.124,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	1	1	48.717.882,58	1	214.645.108,00	1	220.512.008,00	1	221.052.710,00	1	195.471.124,00			
8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					117.787.017,28		472.577.165,00		743.870.450,00		849.127.544,00		861.589.313,00			
Terlaksananya pemeliharaan barang-barang kantor secara teratur sesuai ketentuan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	6	117.787.017,28	6	472.577.165,00	6	743.870.450,00	6	849.127.544,00	6	861.589.313,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	12		12		12		12		12				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	11	11		15		11		11		11				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	54	13		13		13		13		13				
8.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					10.878.639,63		48.798.704,00		49.240.044,00		69.360.782,00		69.360.782,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	6	10.878.639,63	6	48.798.704,00	6	49.240.044,00	6	69.360.782,00	6	69.360.782,00			
8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					62.077.299,92		219.937.470,00		486.302.868,00		571.025.740,00		594.809.832,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	54	13	62.077.299,92	13	219.937.470,00	13	486.302.868,00	13	571.025.740,00	13	594.809.832,00			
8.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.575.462,40		39.697.249,00		39.697.249,00		39.697.249,00		47.937.718,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9	11	11	7.575.462,40	15	39.697.249,00	11	39.697.249,00	11	39.697.249,00	11	47.937.718,00			
8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					37.255.615,33		164.143.742,00		168.630.289,00		169.043.773,00		149.480.981,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	12	37.255.615,33	12	164.143.742,00	12	168.630.289,00	12	169.043.773,00	12	149.480.981,00			
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					3.291.201.000,00		3.249.079.448,00		3.594.321.087,00		3.033.334.859,00		2.644.441.200,00			
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	100	100	3.291.201.000,00	100	3.249.079.448,00	100	3.594.321.087,00	100	3.033.334.859,00	100	2.644.441.200,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara (%)	0	0,002	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002				
8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					3.291.201.000,00		3.249.079.448,00		3.594.321.087,00		3.033.334.859,00		2.644.441.200,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya penanganan konflik sosial serta pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara bagi masyarakat, pemuda, dan Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	0		3.291.201.000,00	1	3.249.079.448,00	1	3.594.321.087,00	1	3.033.334.859,00	1	2.644.441.200,00			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0		0		1		0		0				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50	100	6.066		6.200		6.300		6.400		6.500				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah Paskibraka (Orang)	35	35	35		35		35		35		35				
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	0			35		35		35		35				
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0,00		0,00		57.968.340,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	57.968.340,00	0	0,00	0	0,00			
8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					50.000.000,00		72.614.990,00		70.502.035,00		67.909.256,00		60.126.693,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	100	100	100	50.000.000,00	100	72.614.990,00	100	70.502.035,00	100	67.909.256,00	100	60.126.693,00			
8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1.394.326.000,00		272.614.990,00		370.502.035,00		67.909.256,00		60.126.693,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	50	100	6.066	1.394.326.000,00	6.200	272.614.990,00	6.300	370.502.035,00	6.400	67.909.256,00	6.500	60.126.693,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					50.000.000,00		261.116.233,00		337.260.574,00		338.087.547,00		298.961.966,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	261.116.233,00	1	337.260.574,00	1	338.087.547,00	1	298.961.966,00			
8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					0,00		71.626.360,00		69.681.937,00		71.122.850,00		61.258.514,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	71.626.360,00	1	69.681.937,00	1	71.122.850,00	1	61.258.514,00			
8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00		129.844.317,00		127.872.775,00		25.401.018,00		20.419.505,00		KEPULAUAN RIAU	
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	0		0,00	35	129.844.317,00	35	127.872.775,00	35	25.401.018,00	35	20.419.505,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka					0,00		47.750.907,00		55.745.549,00		58.422.341,00		53.090.712,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	47.750.907,00	1	55.745.549,00	1	58.422.341,00	1	53.090.712,00			
8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka					125.000.000,00		119.377.267,00		125.427.486,00		127.005.089,00		110.265.325,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	0	0	1	125.000.000,00	1	119.377.267,00	1	125.427.486,00	1	127.005.089,00	1	110.265.325,00			
8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					71.875.000,00		119.377.267,00		122.640.209,00		119.384.784,00		102.097.523,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	1	71.875.000,00	1	119.377.267,00	1	122.640.209,00	1	119.384.784,00	1	102.097.523,00			
8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00		138.797.612,00		141.809.162,00		43.181.740,00		38.797.059,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	0		0,00	1	138.797.612,00	1	141.809.162,00	1	43.181.740,00	1	38.797.059,00			
8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka					1.600.000.000,00		2.015.959.505,00		2.114.910.985,00		2.114.910.978,00		1.839.297.210,00		KEPULAUAN RIAU	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	35	35	35	1.600.000.000,00	35	2.015.959.505,00	35	2.114.910.985,00	35	2.114.910.978,00	35	1.839.297.210,00			
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					14.070.933.852,61		6.314.166.997,00		26.710.028.653,00		146.812.672.805,00		6.787.573.330,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat (%)	11,11	33,33	38,89	14.070.933.852,61	44,44	6.314.166.997,00	50,00	26.710.028.653,00	55,56	146.812.672.805,00	61,11	6.787.573.330,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					14.070.933.852,61		6.314.166.997,00		26.710.028.653,00		146.812.672.805,00		6.787.573.330,00			
Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	92		100	14.070.933.852,61	110	6.314.166.997,00	120	26.710.028.653,00	130	146.812.672.805,00	145	6.787.573.330,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	3.600	50	6.114		6.200		6.300		6.400		6.500				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					4.276.083.947,30		521.373.403,00		741.090.718,00		742.907.897,00		656.934.002,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	3.600	50	6.114	4.276.083.947,30	6.200	521.373.403,00	6.300	741.090.718,00	6.400	742.907.897,00	6.500	656.934.002,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					9.744.849.905,31		5.531.677.361,00		25.631.677.361,00		145.731.677.361,00		5.831.677.361,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	92		100	9.744.849.905,31	110	5.531.677.361,00	120	25.631.677.361,00	130	145.731.677.361,00	145	5.831.677.361,00			
8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					50.000.000,00		261.116.233,00		337.260.574,00		338.087.547,00		298.961.967,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1		1	50.000.000,00	1	261.116.233,00	1	337.260.574,00	1	338.087.547,00	1	298.961.967,00			
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					3.944.274.173,26		1.971.554.093,00		2.105.196.435,00		2.109.479.283,00		1.886.850.247,00			
Meningkatnya ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (%)	97	85	85	3.944.274.173,26	85,15	1.971.554.093,00	85,31	2.105.196.435,00	85,53	2.109.479.283,00	85,71	1.886.850.247,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					3.944.274.173,26		1.971.554.093,00		2.105.196.435,00		2.109.479.283,00		1.886.850.247,00			
Meningkatnya kepatuhan Ormas/LSM terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1		1	3.944.274.173,26	1	1.971.554.093,00	1	2.105.196.435,00	1	2.109.479.283,00	1	1.886.850.247,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	125	150	150		44		48		53		58				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	75		165		181		199		219				
8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					50.000.000,00		338.544.160,00		358.544.160,00		358.544.160,00		338.544.160,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	75	50.000.000,00	165	338.544.160,00	181	358.544.160,00	199	358.544.160,00	219	338.544.160,00			
8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					3.844.274.173,26		1.371.893.700,00		1.409.391.701,00		1.412.847.575,00		1.249.344.120,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	125	150	150	3.844.274.173,26	44	1.371.893.700,00	48	1.409.391.701,00	53	1.412.847.575,00	58	1.249.344.120,00			
8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					50.000.000,00		261.116.233,00		337.260.574,00		338.087.548,00		298.961.967,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1		1	50.000.000,00	1	261.116.233,00	1	337.260.574,00	1	338.087.548,00	1	298.961.967,00			
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					3.604.232.000,00		1.663.205.517,00		1.409.752.570,00		1.413.209.329,00		1.249.664.009,00			
Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani (%)	100	100	100	3.604.232.000,00	100	1.663.205.517,00	100	1.409.752.570,00	100	1.413.209.329,00	100	1.249.664.009,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					3.604.232.000,00		1.663.205.517,00		1.409.752.570,00		1.413.209.329,00		1.249.664.009,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya penanganan konflik ekonomi, budaya, dan agama sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	3.604.232.000,00	2	1.663.205.517,00	0	1.409.752.570,00	0	1.413.209.329,00	0	1.249.664.009,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100	50	1.200		330		363		399		439,2				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	101	12	12		13		14		16		17				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					0,00		358.131.801,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0,00	2	358.131.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					299.000.000,00		308.593.518,00		317.028.312,00		317.805.675,00		281.027.238,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	100	50	1.200	299.000.000,00	330	308.593.518,00	363	317.028.312,00	399	317.805.675,00	439,2	281.027.238,00			
8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					3.255.232.000,00		735.363.965,00		755.463.682,00		757.316.106,00		669.674.805,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	101	12	12	3.255.232.000,00	13	735.363.965,00	14	755.463.682,00	16	757.316.106,00	17	669.674.805,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					50.000.000,00		261.116.233,00		337.260.576,00		338.087.548,00		298.961.966,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	261.116.233,00	1	337.260.576,00	1	338.087.548,00	1	298.961.966,00			
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					17.235.317.195,68		18.835.018.583,00		27.080.201.534,00		49.574.726.173,00		22.554.646.246,00			
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani (%)	100	100	100	17.235.317.195,68	100	18.835.018.583,00	100	27.080.201.534,00	100	49.574.726.173,00	100	22.554.646.246,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					17.235.317.195,68		18.835.018.583,00		27.080.201.534,00		49.574.726.173,00		22.554.646.246,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya penanganan potensi konflik sosial sesuai kewenangan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	80	150	2	17.235.317.195,68	250	18.835.018.583,00	250	27.080.201.534,00	275	49.574.726.173,00	302	22.554.646.246,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	964	190	1.190		180		180		198		217				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					420.000.000,00		238.136.114,00		197.019.800,00		197.502.899,00		174.646.643,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	80	150	2	420.000.000,00	250	238.136.114,00	250	197.019.800,00	275	197.502.899,00	302	174.646.643,00			
8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					6.541.831.835,42		4.103.047.151,00		4.085.108.094,00		3.890.873.918,00		2.368.691.397,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	964	190	1.190	6.541.831.835,42	180	4.103.047.151,00	180	4.085.108.094,00	198	3.890.873.918,00	217	2.368.691.397,00			
8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					50.000.000,00		261.116.233,00		337.260.574,00		338.087.547,00		298.961.966,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	261.116.233,00	1	337.260.574,00	1	338.087.547,00	1	298.961.966,00			
8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi					10.223.485.360,26		14.232.719.085,00		22.460.813.066,00		45.148.261.809,00		19.712.346.240,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4	4	10.223.485.360,26	4	14.232.719.085,00	4	22.460.813.066,00	4	45.148.261.809,00	4	19.712.346.240,00			

Tabel 4.3: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1,	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam Mewujudkan Kerukunan Bangsa	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
			8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2,	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik Melalui Pendidikan Politik	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
3,	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.4: Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1,	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
2,	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,21	84.32-84.46	84.37-84.51	84.42-84.56	84.47-84.61	84.52-84.66	84.52-84.66	
3,	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	74,25	74,25	74,26	74,26	74,27	74,27	74,28	

Tabel 4. 5: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1,	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2,	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3,	Presentase Ormas/LSM yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	positif	%	97	85	85	85,15	85,31	85,53	85,71	
4,	Presentase Potensi Konflik Antar Suku dan Etnis di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5,	Presentase Potensi Konflik Ekonomi, Budaya, dan Agama di Provinsi Kepulauan Riau yang Tertangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6,	Presentase Potensi Konflik Sosial di Daerah yang Tertangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7,	Persentase Partai Politik yang melakukan Pendidikan Politik Masyarakat	positif	%	11,11	33,33	38,89	44,44	50,00	55,56	61,11	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8,	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara	positif	%	0	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
9,	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	83,88	83,97	84,85	85,73	87,53	88,75	89,64	
10,	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	88,54	88,55	88,56	88,57	88,58	88,59	88,60	

KESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPULAUAN RIAU

BAB 5

PENUTUP

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, integrasi, dan sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, khususnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Melalui Renstra ini, Badan Kesbangpol diarahkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan (melalui penguatan SAKIP), perkembangan demokrasi daerah (melalui peningkatan Indeks Demokrasi), serta penguatan kerukunan umat beragama sebagai bagian dari pemajuan budaya Melayu dan ketahanan sosial masyarakat (melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama).

Seluruh rumusan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini disusun melalui mekanisme *cascading* dari visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah.

Beberapa kaidah utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1) Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
   Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra ini harus dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta dokumen anggaran (RKPD dan APBD), guna menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
2) Berorientasi pada Hasil (Result-Based Management)
   Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang terukur, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
   Capaian pelaksanaan Renstra akan dipantau dan dievaluasi secara periodik melalui mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah, serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4) Penyesuaian terhadap Dinamika Strategis
   Renstra dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan signifikan terhadap kebijakan nasional, kondisi sosial politik, atau hasil evaluasi strategis lainnya, sepanjang tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan arah pembangunan jangka menengah daerah.
5) Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor
   Pelaksanaan Renstra ini menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat sipil, untuk memastikan kebijakan kesatuan bangsa dan politik dijalankan secara kolaboratif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menjadikan kaidah-kaidah tersebut sebagai landasan, diharapkan pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 tidak terlepas dari kebutuhan akan sistem pengendalian yang efektif, evaluasi yang berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang adaptif. Ketiganya merupakan instrumen penting dalam memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan tetap berada dalam jalur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengendalian Internal

   Pengendalian dilakukan dengan memantau secara berkala pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan melalui sistem pelaporan dan supervisi manajerial. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan, serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap target kinerja.

2) Evaluasi Kinerja

   Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur capaian indikator kinerja, baik output maupun outcome, yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Evaluasi ini dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Tahunan (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3) Manajemen Risiko

   Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang dapat berdampak terhadap pelaksanaan program dan pencapaian sasaran, Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau menerapkan prinsip manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan analisis dan penyusunan rencana mitigasi atas risiko-risiko potensial yang mungkin timbul.

4) Perbaikan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

   Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Proses ini menjadi bagian dari siklus manajemen strategis agar pelaksanaan Renstra tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan aktual di lapangan.

Dengan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko yang terintegrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya secara lebih akuntabel, adaptif, dan berdaya guna dalam mendukung stabilitas politik, kerukunan sosial, dan ketahanan bangsa di daerah.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU